



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGUNA BARANG/KUASA PENGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa kekayaan daerah yang bersifat kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan penunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dikelola serta dipelihara keutuhannya dengan tertib dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/yang dikuasai daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Penguna Barang/Kuasa Penguna Barang, Pejabat Penatausahaan Penguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 930);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 571);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 581);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 582);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 583);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di

KEDUA : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. Pengelola Barang :
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Pejabat Penatausahaan Barang :
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.
3. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
4. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang :
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus barang Pembantu.
5. Pengurus Barang Pengelola :
- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - e. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;

- g. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- h. menyimpan salinan dokumen laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- i. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. merekapitulasi dan menghimpun laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- k. menandatangani sempadan/tapal batas tanah pada Pengelola Barang.

6. Pengurus Barang Pengguna :

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- c. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- e. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- f. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- h. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- j. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- k. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- l. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- m. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- n. memberi label barang milik daerah;
- o. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan

kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

- p. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- q. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- r. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- s. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

7. Pengurus Barang Pembantu :

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang;
- b. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- c. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- e. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- f. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- h. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- j. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- k. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- l. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- m. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- n. memberi label barang milik daerah;
- o. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah/pengecekan fisik barang;

- p. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- q. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- r. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- s. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 JANUARI 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 31 TAHUN 2026
Tanggal : 2 JANUARI 2026

**PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGUNA BARANG DAN KUASA PENGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1	SEKRETARIS DAERAH	PENGELOLA BARANG
2	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
		PENGUNA BARANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENGUNA BARANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	INSPEKTUR DAERAH	PENGUNA BARANG INSPEKTORAT DAERAH
5	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENGUNA BARANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGUNA BARANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI	PENGUNA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KOPRI
8	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
9	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGUNA BARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGUNA BARANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	PENGUNA BARANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
12	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	PENGUNA BARANG BADAN PENGHUBUNG DAERAH
13	KEPALA DINAS PARIWISATA	PENGUNA BARANG DINAS PARIWISATA
14	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
15	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PENGGUNA BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
16	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA BARANG DINAS PERHUBUNGAN
17	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
18	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL
19	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	PENGGUNA BARANG DINAS KEBUDAYAAN
20	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
21	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PENGGUNA BARANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
22	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PENGGUNA BARANG DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
23	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENGGUNA BARANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA BARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PENGGUNA BARANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENGGUNA BARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
28	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	PENGGUNA BARANG DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
30	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN
31	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PENGGUNA BARANG DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
33	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGGUNA BARANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
34	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	PENGGUNA BARANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
35	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN
36	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN
37	KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN
38	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
39	KEPALA BIRO HUKUM	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
40	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
41	KEPALA BIRO ORGANISASI	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
42	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
43	KEPALA BIRO UMUM	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
44	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
45	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
46	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BATAM CENTRE	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
47	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
48	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
49	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINTAN	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
50	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LINGGA	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
51	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NATUNA	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
52	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
53	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BATU AJI	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
54	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KIJANG	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
55	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BATU	KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
56	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
57	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
58	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
59	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 4 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
60	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 5 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
61	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 6 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
62	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 7 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
63	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
64	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
65	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
66	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
67	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
68	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI 1 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
69	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
70	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
71	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
72	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
73	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 4 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
74	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 5 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
75	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 6 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
76	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 7 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
77	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 8 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
78	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 9 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
79	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 10 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
80	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 11 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
81	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 12 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
82	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 13 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
83	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 14 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
84	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 15 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
85	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 16 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
86	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 17 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
87	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 18 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
88	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 19 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
89	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 20 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
90	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 21 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
91	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 22 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
92	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 23 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
93	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 24 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
94	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 25 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
95	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 26 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
96	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 27 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
97	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 28 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
98	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 29 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
99	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
100	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
101	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 3 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
102	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 4 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
103	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 5 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
104	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 6 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
105	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 7 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
106	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 8 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
107	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 9 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
108	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 10 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
109	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 11 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
110	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 12 BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
111	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI BATAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
112	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 MANTANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
113	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TAMBELAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
114	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BINTAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
115	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BINTAN PESISIR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
116	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BINTAN PESISIR KELAS JAUH MAPUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
117	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 BINTAN PESISIR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
118	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TOAPAYA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
119	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BINTAN UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
120	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TELUK BINTAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
121	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 TELUK BINTAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
122	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TELUK SEBONG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
123	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 GUNUNG KIJANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
124	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 SRI KUALA LOBAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
125	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
126	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
127	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI BINTAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
128	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI KIJANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
129	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
130	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
131	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
132	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 4 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
133	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 5 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
134	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
135	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
136	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 MORO	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
137	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SUGIE BESAR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
138	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
139	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
140	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
141	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 4 KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
142	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 UNGAR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
143	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BELAT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
144	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
145	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
146	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI KUNDUR UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
147	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 MORO	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
148	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BURU	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
149	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI KARIMUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
150	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 DURAI	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
151	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI KUNDUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
152	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 LINGGA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
153	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 LINGGA TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
154	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SELAYAR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
155	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 LINGGA UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
156	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SINGKEP BARAT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
157	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SENAYANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
158	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KATANG BIDARE	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
159	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BAKUNG SERUMPUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
160	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TEMIANG PESISIR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
161	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 SINGKEP	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
162	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SINGKEP	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
163	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 SINGKEP	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
164	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 LINGGA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
165	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 LINGGA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
166	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 SENAYANG	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
167	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SINGKEP SELATAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
168	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SINGKEP PESISIR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
169	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KEPULAUAN POSEK	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
170	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 BAKUNG SERUMPUN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
171	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI LINGGA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
172	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SERASAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
173	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
174	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
175	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 MIDAI	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
176	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PULAU LAUT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
177	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PULAU TIGA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
178	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SUBI	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
179	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BATUBI	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
180	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
181	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
182	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
183	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
184	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
185	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
186	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
187	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SERASAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
188	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
189	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
190	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI NATUNA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
191	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
192	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SELUAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
193	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SIANTAN	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
194	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SIANTAN TIMUR	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
195	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PALMATAK	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
196	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SIANTAN UTARA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
197	KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 JEMAJA	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
198	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
199	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
200	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 3 ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
201	KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 4 ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
202	KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI ANAMBAS	KUASA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 31 TAHUN 2026
Tanggal : 2 JANUARI 2026

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	UNIT KERJA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
		NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	HANI MARTA THEODORA, M.S.E. NIP 198206302006042013	Pembina (IV/a)
2	SEKRETARIAT DPRD	NANDA REINDRA, S.H NIP 198205302010011011	Penata Tk.I (III/d)
3	INSPEKTORAT DAERAH	HELVIS FERDINANSYAH. B, S.E NIP 198409152014041001	Penata (III/c)
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ACHMAD ARDIANSYAH, S.TP.,M.AP NIP 197010122000031004	Pembina Tk. I (IV/b)
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	DESY ENDANG SUSANTI, S.S NIP 198012062011012001	Penata Tk.I (III/d)
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Dr. SUDIANTO, S.E., M.Si. NIP 197606062010011018	Pembina (IV/a)
7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SRI ASTUTI. SE.,MA NIP 197309222003122003	Pembina Tk. I (IV/b)
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALUDIN ANDI, S.E.,M.M NIP 198002112006041006	Pembina Tk. I (IV/b)
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DELFA HERLINA, S.Pd. M.A.P NIP 198607112009032001	Penata Tk.I (III/d)
10	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	ANDI AMIRULLAH, SE NIP 197409122006041008	Penata Tk.I (III/d)
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	RONAWATI, SE NIP 197810162010012013	Penata Tk.I (III/d)
12	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	ACHMAD MUARIH ADABY, SE NIP 198705032010011006	Penata Muda Tk.I(III/b)
13	DINAS PARIWISATA	CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP NIP 199404162017082002	Penata (III/c)
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ROSMAINI BUSTAMAM, SKM., M.A.P NIP 197610032006042002	Penata Tk.I (III/d)
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	JHON ANDARIASTA BARUS, SE.,M.Ak NIP 197609092006041010	Pembina (IV/a)
16	DINAS PERHUBUNGAN	FERI GUSTIAWAN, S.E., M.Si. NIP 197508052010011015	Pembina (IV/a)
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	BAMBANG AZMANTO, S.E.,M.Si NIP 197904292006041006	Penata Tk.I (III/d)
18	DINAS SOSIAL	MUHAMMAD SALMAN AL FARISI, S.STP NIP 199308162015071002	Penata (III/c)

NO	UNIT KERJA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
		NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
19	DINAS KEBUDAYAAN	ARNASARI, S.STP, M.Tr.IP NIP 199209292014062001	Penata (III/c)
20	DINAS PENDIDIKAN	SAID AL KAHFI ALATAS, S. AP. NIP 198508052006041004	Penata (III/c)
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ELDA FEBRIANASARI ANUGERAH, S.IP NIP 199102222015032004	Penata (III/c)
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TETTY LIDYAWATI, SE NIP 197610062008032001	Penata Tk.I (III/d)
23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	M. PURWANDI, SE NIP 198507042010011017	Penata (III/c)
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JAMES SIMON PATTIKAWA, SE NIP 196904162002121001	Pembina (IV/a)
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	LIZA NOVIANTY, SE NIP 198311182010012015	Penata (III/c)
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	dr. Hj. SULASTRI, M.Si. NIP 197001202002122002	Pembina Tk.I (IV/b)
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	AZIKA, SE.,M.Si NIP198205232015032002	Penata Tk.I (III/d)
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	LAODE ARDIAN TAWOLUMEWA, S.STP NIP 1980008301998101004	Pembina Tk. I (IV/b)
29	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	ISKANDAR, S.E., M.A.P NIP 198509082010011014	Penata Tk.I (III/d)
30	DINAS KESEHATAN	YESSI ERFANA, Amd.Keb NIP 198407222006042010	Penata Tk.I (III/d)
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NASIRUDDIN, A.Md NIP 197604262010011005	Penata Muda Tk.I(III/b)
32	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	ERIKA FIOLANANDA, S.S NIP 198108182010012025	Penata Tk.I (III/d)
33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	LA ODE M FAISAL, S.Pi, M.Ling NIP 19785012006041009	Pembina (IV/a)
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	MUHAMMAD NURYANI, ST., MH NIP 197706252007011024	Pembina Tk.I (IV/b)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
1	PENGURUS BARANG PENGELOLA	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	SEKRETARIAT DAERAH	FITRIAN ARMANDA, S.Kom NIP 199004262014041001	Penata (III/c)
3	SEKRETARIAT DPRD	SOLEH VUDIN GOZALI, ST NIP 198004182015031001	Penata Muda (III/a)
4	INSPEKTORAT DAERAH	IRFAN HIDAYAT, S.Pd.I NIP 198203212010011016	Penata Tk.I (III/d)
5	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ENDAH LESTARI, S.M. NIP 198308132014012001	Penata Muda (III/a)
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI	DODI TRI NANDA, A.Md NIP 199006082015031002	Penata Muda (III/a)
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANDRIVAI SYAPRUDIN, S. Sos., M.A.P NIP 198308242007011003	Penata (III/c)
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	NOVA FAJARYANTO, S.E., M.A.P NIP 198311022014011002	Penata (III/c)
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	LIA YULISTYA, S.I.Kom NIP 198507302011012002	Penata Tk.I (III/d)
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	HETI BARKUN, A.Md NIP 198112292009042001	Penata (III/c)
11	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	ADRIAN LUFTI, A.Md. NIP 198311142010011015	Penata Muda Tk.I (III.b)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	YESSI ANGRIANI, S.Psi NIP 198508022009042001	Penata Tk.I (III/d)
13	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	ADE FERDO NIP 198408082015031002	Penata Muda (III/a)
14	DINAS PARIWISATA	M. HAIRIL, S.Pd NIP 198502092011011003	Penata Tk.I (III/d)
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	RESTY LIDYANINGSIH, A.M.K NIP 198901122011012004	Penata Muda Tk.I (III.b)
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	NOVI HENDRI,S.Sos NIP 197802042007011020	Penata Muda Tk.I (III/b)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
17	DINAS PERHUBUNGAN	SIDQI TAUFIK ALHAKIM, S.Si NIP 199609092022031001	Penata Muda (III/a)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	BAMBANG SUMANTO, A.Md NIP 198211052013101001	Penata Muda (III/a)
19	DINAS SOSIAL	ALIFYANRI, A.Md NIP 197806212006041008	Penata (III/c)
20	DINAS KEBUDAYAAN	NADYA YANTI, S.IP NIP 197904302011012001	Penata Muda (III/a)
21	DINAS PENDIDIKAN	RIDUAN ZUHRI NASUTION, A.Md NIP 198303212010011021	Penata Muda Tk.I (III/b)
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ULUNG SYAPUTRA, S.STP,. M.M. NIP 199007282010101001	Penata Tk.I (III/d)
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RUBAITUL HALIFAH, S.Sos NIP 197707312010012007	Penata (III/c)
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JANUAR DS, S.Sos NIP 197501071998031005	Penata Tk.I (III/d)
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RIKI CIPTO SIMANJUNTAK, S.Kom NIP 198403212011011004	Penata (III/c)
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MUNARMI, S. Sos NIP 197510232014012001	Penata (III/c)
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	MELLIN SYAFITRI, S.I.Pust. NIP 198507182011012007	Penata Muda (III/a)
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MUZAKIR, SE NIP 197309112007011024	Penata (III/c)
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	CHAIRANI SELVIANI, S.T NIP 199407262019032004	Penata Muda Tk.I (III/b)
30	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	SAID ISHAK NIP 198105182007011012	Penata Muda (III/a)
31	DINAS KESEHATAN	GINA LUCIANA SISKI, Amd. Kep NIP 198807072011012004	Pengatur Tk. I (II/d)
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NOVITA NASUTION, S. Sos NIP 197711052011012005	Penata Muda Tk.I (III/b)
33	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	INDRA SOFIANTO, SE NIP 198104242015031002	Penata (III/c)
34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	IRWAN FITRA, S.S.T.Ars NIP 197812062006041011	Penata Muda (III/a)
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	ABDUL AZIZ, S.IP NIP 197608202007011015	Penata (III/c)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 31 TAHUN 2026
Tanggal : 2 JANUARI 2026

**PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SRI WAHYUNI MARPAUNG, S.E NIP 198105272006042012	Penata Tk.I (III/d)
2	BIRO HUKUM	SITI SABARIAH, S. Sos NIP 198106152013102001	Penata (III/c)
3	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	FATIMAH WAHYU ASTUTI, S.S.T.Ars NIP 197603142011012002	Penata Muda Tk.I (III/b)
4	BIRO ORGANISASI	MOHAMMAD RISKY SYAPUTRA, S.STP.,M.Si NIP 199312022016091001	Penata (III/c)
5	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	ISNA YUNINGSIH, SE.,MM NIP 197806182010012014	Penata Tk.I (III/d)
6	BIRO UMUM	WINCE ARIKA WIRMAN, A.Md NIP 19810917201001218	Penata Muda Tk.I (III/b)
7	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DIYAN WAHYU HARTATY S., A.Md NIP 197411262006042011	Penata (III/c)
8	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	RATU ARDHILLA TUNNISYA, S.AP NIP 199901212022032008	Penata Muda (III/a)
9	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BATAM CENTRE	TIURMA ERNAWATI TAMBUNAN, SE NIP 197602232006042006	Penata Tk.I (III/d)
10	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG	MUHAMMAD GHAFAR NIP 197705272006041015	Pengatur Tk.I (II/d)
11	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KARIMUN	NORITA, S.IP NIP 197205142006042017	Penata (III/c)
12	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINTAN	RAMZI YUSWADI NIP 198306292014011001	Pengatur (II/c)
13	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LINGGA	OON TRIADI NIP 198110102014011001	Pengatur (II/c)
14	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS	MUHAMMAD FAHRI, S.H NIP 198910102011011001	Penata Muda (III/a)
15	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NATUNA	SYAMSUL BAHAR, S.Pd NIP 197507102005021003	Penata Tk.I (III/d)
16	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BATU AJI	BAMBANG SUGIHARTO, A.Md NIP 197310052011011001	Pengatur TK I (II/d)
17	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KIJANG	MEIDI YANTO, S.E., M.Ak NIP 197305232006041009	Penata Tk.I (III/d)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
18	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BATU	FIRMANSYAH NIP 198208212010011008	Pengatur Tk.I (II/d)
19	RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD	RIKI OKTA HENDRI, S.Gz NIP 199510102020121005	Penata Muda (III/a)
20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB	SYAFRIZAL, A.Md.P.K NIP 198909072020121002	Pengatur Tk.I (II/d)
21	UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN	WARNI, S. Fram, Apt NIP 197803152006042009	Penata (III/c)
22	SMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG	SITI HAJAR, SE. NIPPPK 197911062025212010	(Golongan IX)
23	SMA NEGERI 2 TANJUNGPINANG	ANDIKA SAPUTRA, SE NIPPPK 199507282025211016	(Golongan IX)
24	SMA NEGERI 4 TANJUNGPINANG	NAMMEI NIP 197805062007012014	Penata Muda (III/a)
25	SMA NEGERI 5 TANJUNGPINANG	SARPONI NIP 196909132007011022	Pengatur Tk.I (II/d)
26	SMA NEGERI 6 TANJUNGPINANG	EKI PUTRA GEMILANG NIP 199911072025211003	(Golongan V)
27	SMA NEGERI 7 TANJUNGPINANG	SUPRIADI NIPPPK 200001032025211006	(Golongan V)
28	SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG	HARIS, S.Ag. NIPPPK 198012102023211004	(Golongan IX)
29	SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG	SRI ASTUTI, S. Pd NIP 198208242009022002	Penata (III/c)
30	SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG	JOKO PRAYETNO, S.St NIP 198206112015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)
31	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	DESSY ANGGRAINI, S.Pd. NIP 198112192009022002	Penata Tk.I (III/d)
32	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	SYARIFUDDIN AHMAD, S.Pd NIP 198811092019011002	Penata Muda Tk.I(III/b)
33	SLB NEGERI 1 TANJUNGPINANG	SABRI ARRASYID, S.Sn NIPPPK 198901312024211009	(Golongan IX)
34	SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG	SITI NGAZIZAH, S.Pd NIP 199706142020122006	Penata Muda (III/a)
35	SMA NEGERI 1 BATAM	QOLBY NOOR FASYA. S. Pd NIPPPK 199201122025212022	(Golongan IX)
36	SMA NEGERI 2 BATAM	TRI ANGGRAINI, S.Pd NIPPPK 199512272024212013	(Golongan/IX)
37	SMA NEGERI 3 BATAM	MOCH CHOIRUL HUDA, S.Pd. NIPPPK 199111262023211008	(Golongan IX)
38	SMA NEGERI 4 BATAM	SELVIA YUSTIMAR, S.Pd NIP 197308272003122002	Pembina (IV/a)
39	SMA NEGERI 5 BATAM	AGUSRIZAL DIANSYAH, S.Pd. NIP 19910816082015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)
40	SMA NEGERI 6 BATAM	EMA, S.Pd.I NIPPPK 198410282025212046	(Golongan IX)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
41	SMA NEGERI 7 BATAM	EKO SANTOSO, S.Kom NIPPPK 198403212025211032	(Golongan IX)
42	SMA NEGERI 8 BATAM	DWI ANNESARTIKA, S.Pd NIPPPK 198910222022211010	(Golongan IX)
43	SMA NEGERI 9 BATAM	ZULKIFLI, S.Si NIPPPK 199112072024211002	(Golongan IX)
44	SMA NEGERI 10 BATAM	HENDRA KAOLANG, S.Mis NIPPPK 199010292023211007	(Golongan IX)
45	SMA NEGERI 11 BATAM	YELNI YARSI, S.Ag NIP 197612252006042029	Penata Tk.I (III/d)
46	SMA NEGERI 12 BATAM	HARRY TRIWIBOWO, S.Pd NIPPPK 199203022024211006	(Golongan IX)
47	SMA NEGERI 13 BATAM	MHD. AZLI, S.Pd NIPPPK 199406112023211009	(Golongan IX)
48	SMA NEGERI 14 BATAM	POPY RIMALA SURYA, S.E NIPPPK 197712152025212019	(Golongan IX)
49	SMA NEGERI 15 BATAM	SUBHAN RIFA'I, S.Pd NIPPPK 198008072023211004	(Golongan IX)
50	SMA NEGERI 16 BATAM	NURMAYA SARI, S.Pd NIPPPK 199109122023212027	(Golongan IX)
51	SMA NEGERI 17 BATAM	BUDI EDWIN, S.Pd NIP 197205102005021006	Penata Tk.I (III/d)
52	SMA NEGERI 18 BATAM	RATNA SARI AFRILIA, S.M NIPPPK 199904082025212067	(Golongan IX)
53	SMA NEGERI 19 BATAM	FEFRIZA ERFAN, S.Sn NIP 198001152009032002	Penata Muda Tk.I (III/b)
54	SMA NEGERI 20 BATAM	RIVO YANDIKO, S.Pd NIPPPK 199511252024211011	(Golongan IX)
55	SMA NEGERI 21 BATAM	FARIZAL HASYIM, S.Pd NIPPPK 198912242023211008	(Golongan IX)
56	SMA NEGERI 22 BATAM	RESTU GUSTIAN ASRA, S.Sn NIPPPK 199908092024211005	(Golongan IX)
57	SMA NEGERI 23 BATAM	ZOLA OKTAVIANIS, S.T NIPPPK 198210102022212009	(Golongan IX)
58	SMA NEGERI 24 BATAM	SLAMET DEPIT NOVRIANTO, S.Pd NIPPPK 198511202022212003	(Golongan IX)
59	SMA NEGERI 25 BATAM	SLAMET DARDIRI,S.E. NIPPPK 198411232024211006	(Golongan IX)
60	SMA NEGERI 26 BATAM	SYAIFUL BAHRI, S.T NIPPPK 197704262022211005	(Golongan IX)
61	SMA NEGERI 27 BATAM	SULAIMAN ALI, S.Pd NIPPPK 198711132023211007	(Golongan IX)
62	SMA NEGERI 28 BATAM	ZUL ADHA, S.Si NIP 198110042011011002	Penata Muda Tk.I (III/b)
63	SMA NEGERI 29 BATAM	EVA TRYSIA,S.Pd NIP 197801012011012002	Penata Muda Tk.I (III/b)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
64	SMK NEGERI 1 BATAM	CATTELYA FLOR DELUNA, S.E NIPPPK 199107112025212041	(Golongan/IX)
65	SMK NEGERI 2 BATAM	GUSTI ZILVIANI ASRI, S.Par NIPPPK 199706032022212011	(Golongan/IX)
66	SMK NEGERI 3 BATAM	HENGKI MAHENDRA, S.Pd.,Gr. NIPPPK 199005102022211002	(Golongan IX)
67	SMK NEGERI 4 BATAM	GALANG ZAKI AULIA, S.Pd NIPPPK 199906242024211007	(Golongan IX)
68	SMK NEGERI 5 BATAM	ANDHUR MAISYIR, S.Pd. NIPPPK 200009142024211002	(Golongan IX)
69	SMK NEGERI 6 BATAM	SRI WAHYUNINGSIH, S.T NIPPPK 198407192022212025	(Golongan IX)
70	SMK NEGERI 7 BATAM	EDP PRAMUDIA, S.Pd NIPPPK 19890905 201503 2 006	(Golongan IX)
71	SMK NEGERI 8 BATAM	EKHO SAPUTRA, S.T NIPPPK 198907152025211032	(Golongan IX)
72	SMK NEGERI 9 BATAM	EKO BUDI SETIYAWAN, S.Kom NIPPPK 199810222024211002	(Golongan IX)
73	SMK NEGERI 10 BATAM	GUNTUR YUDHA PRAWIRA, S.Pd NIP 198803152014031004	Penata Muda Tk.I (III/b)
74	SMK NEGERI 11 BATAM	YULANDO ADHAPUTRA, S.Pd. NIP 199206052019031003	Penata Muda Tk.I (III/b)
75	SMK NEGERI 12 BATAM	YURI SEPTIA WELLA, S.Pd NIPPPK 199409182025212132	(Golongan IX)
76	SLB NEGERI BATAM	HAMONANGAN LIMBONG, S.Pd NIP 199210142019031002	Penata Muda Tk.I (III/b)
77	SMA NEGERI 1 MANTANG	MISRIANI RETTA ULI SRI REZEKI HUTAURUK, S.Pd NIPPPK 198405282022212007	(Golongan IX)
78	SMA NEGERI 1 TAMBELAN	YUDHI CHANRA, S.HI NIPPPK 198106202022211014	(Golongan IX)
79	SMA NEGERI 1 BINTAN TIMUR	ERNI KURNIASIH, S.Pd NIP 197401142006042014	Pembina Tk.I (IV/b)
80	SMA NEGERI 1 BINTAN PESISIR	ANGGI PERDANA, S.Pd NIP 198903212017081001	Penata Muda Tk.I (III/b)
81	SMA NEGERI 1 BINTAN PESISIR KELAS JAUH MAPUR	ANGGI PERDANA, S.Pd NIP 198903212017081001	Penata Muda Tk.I (III/b)
82	SMA NEGERI 2 BINTAN PESISIR	DORI ANDRY, S. Pd. NIP 198607042010011012	Penata (III/c)
83	SMA NEGERI 1 TOAPAYA	SRI WAHYUNI, S.Pd NIPPPK 199410142024212044	(Golongan IX)
84	SMA NEGERI 1 BINTAN UTARA	TRI HESTI PRIHATINI, S.Pd.Si NIP 198112142010012010	Penata TK.I (III/d)
85	SMA NEGERI 1 TELUK BINTAN	HARUN KURNIAWAN, S.M. NIPPPK 199905142025211007	(Golongan IX)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
86	SMA NEGERI 2 TELUK BINTAN	SYAMSUDIN LANGO KUKUN, S. Sos NIPPPK 198803272024211003	(Golongan IX)
87	SMA NEGERI 1 TELUK SEBONG	KUKUH ANGERWASPODO, S.Pd.I NIPPPK 198612282023211008	(Golongan IX)
88	SMK NEGERI 1 GUNUNG KIJANG	SYAFRINAL, S.Pd NIP 198010162015031001	Penata Muda Tk.I (III/b)
89	SMK NEGERI 1 SRI KUALA LOBAM	DAVID SINGGALINGGING, S.Pd NIP 198707132019031001	Penata Muda Tk.I (III/b)
90	SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR	VIKA YULINDASARI, S.Pd.I NIPPPK 199307172025212029	(Golongan V)
91	SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	DWI PERMANA SAPUTRA, S.H NIPPPK 199312052025211024	(Golongan IX)
92	SLB NEGERI BINTAN	DEWI RETNO LESTARI, S.Pd. NIP 198901282015032005	Penata Muda Tk.I (III/b)
93	SLB NEGERI KIJANG	MUHAMMAD HOERUL NAZIB NUR, S.Pd NIPPPK 199711032024211004	(Golongan IX)
94	SMA NEGERI 1 KARIMUN	HASRA FIRMANSYAH, S.Sos NIP 198005042009041001	Penata Muda Tk.I (III/b)
95	SMA NEGERI 2 KARIMUN	SAMSUL HADI, S.Pd NIP 196911222007011019	Penata Muda Tk.I (III/b)
96	SMA NEGERI 3 KARIMUN	AGUS HERWANTO NIP 198508292012121001	Pengatur (II/c)
97	SMA NEGERI 4 KARIMUN	RUKIMIN NIP 197702232009011003	Pengatur (II/c)
98	SMA NEGERI 5 KARIMUN	LATIFATURROHMAH, S.Pd.I NIP 198504222020122001	Penata Muda (III/a)
99	SMK NEGERI 1 KARIMUN	ZULMANSYAH NIP 197312232007011021	Penata Muda Tk.I (II/b)
100	SMK NEGERI 2 KARIMUN	TIKA PERMATASARI, S.Pd NIPPPK 199505062022212007	(Golongan IX)
101	SMA NEGERI 1 MORO	FAHRY ERRIZIK, S.Pd NIPPPK 198811292025211020	(Golongan IX)
102	SMA NEGERI 1 SUGIE BESAR	SUHARDI NIPPPK 198702092025211013	(Golongan V)
103	SMA NEGERI 1 KUNDUR	SITI ROMLAH NIP 197903282007012014	Penata Muda (III/a)
104	SMA NEGERI 2 KUNDUR	IWAN EVENDY NIP 197706021999051001	Penata Muda (III/a)
105	SMA NEGERI 3 KUNDUR	ASRARUDDIN NIP 198009282010011003	Pengatur Tk.I (II/d)
106	SMA NEGERI 4 KUNDUR	MUHAMAD FAUZUL NIP 197809142010011005	Pengatur Tk.I (II/d)
107	SMA NEGERI 1 UNGAR	ALLIN ISTIKA CHANDRA, S.Pd NIPPPK 199501122024212016	(Golongan IX)
108	SMA NEGERI 1 BELAT	HERU SUPRIYANTO, S.Pd NIPPPK 198602252022211006	(Golongan IX)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
109	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	THALIA ANGELINA SEMBIRING, S.Pd NIPPPK 200012042025212011	(Golongan IX)
110	SMK NEGERI KUNDUR	SANTI RUSMINI NIPPPK 198703212025212011	(Golongan V)
111	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	YELTSIN GIULINO NABABAN, S.Pd Gr NIP 199206262019031001	Penata Muda Tk.I (III/b)
112	SMK NEGERI 1 MORO	FARMADI NIPPPK 197301092025211019	(Golongan V)
113	SMA NEGERI 1 BURU	MASTURINAH, S.Ag NIP 197801072006042022	Penata Tk.I (III/d)
114	SLB NEGERI KARIMUN	JARUDIN SINAGA NIP 198808102020121002	Penata Muda Tk.I (III/b)
115	SMA NEGERI 1 DURAI	NOVA FITRIANI, S. Pd NIPPPK 199005262025212024	(Golongan IX)
116	SLB NEGERI KUNDUR	FATMALA, S.Pd NIPPPK 199410192023212012	(Golongan IX)
117	SMA NEGERI 1 LINGGA	SARMIAN SITANGGANG, S.T NIP 198204102011012004	Penata Tk.I (III/d)
118	SMA NEGERI 1 LINGGA TIMUR	WAHYUDI, S.Si NIPPPK 198509042022211010	(Golongan IX)
119	SMA NEGERI 1 SELAYAR	SUFRIANTO NIPPPK 199105182025211017	(Golongan V)
120	SMA NEGERI 1 LINGGA UTARA	DEDY KURNIADI NIP 197412312014061007	Pengatur (II/c)
121	SMA NEGERI 1 SINGKEP BARAT	FRANTINUS RUMAPEA, S.Sn NIP 199403022019031001	Penata Muda Tk.I (III/b)
122	SMA NEGERI 1 SENAYANG	HENDRA NIPPPK 198005142025211018	(Golongan V)
123	SMA NEGERI 1 KATANG BIDARE	AGUS SUSANTO, S.Pd NIP 199508062020121004	Penata Muda (III/a)
124	SMA NEGERI 1 BAKUNG SERUMPUN	DEWI HIDAYATI, S.Pd. I NIP 199209022019032003	Penata Muda Tk.I (III/b)
125	SMA NEGERI 1 TEMIANG PESISIR	SARIDO IKANG FAUZI GULO,S.Pd NIPPPK 199303092022211012	(Golongan IX)
126	SMK NEGERI 1 SINGKEP	RATNAWATY HERLI SUSANTI NIPPPK 198107092025212020	(Golongan V)
127	SMA NEGERI 1 SINGKEP	RACHMAYANTI, S.Pd NIP 197903232009032006	Penata Tk.I (III/d)
128	SMA NEGERI 2 SINGKEP	DEWI KURNIAWATI, S.E. NIPPPK 199405132025212059	(Golongan IX)
129	SMK NEGERI 1 LINGGA	WARIS SUKIJJO,S.Pd NIP 198808062019031001	Penata Muda Tk.I (III/b)
130	SMK NEGERI 2 LINGGA	MOHAMAD FAHRIZAL, S.Pd NIP 198705122010011005	Penata Tk.I (III/d)
131	SMK NEGERI 1 SENAYANG	MOHD. RAMADHANI,S.Pi NIP 199502032020121004	Penata Muda Tk.I (III/b)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
132	SMA NEGERI 1 SINGKEP SELATAN	ANUGRAH, S.Pd. NIPPPK 199105242024211013	(Golongan IX)
133	SMA NEGERI 1 SINGKEP PESISIR	MUHAMAD ARGAFAR NIPPPK 200010022025211001	(Golongan IX)
134	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN POSEK	ALFAZRI REFANJI, S. Pd NIPPPK 199606102022211011	(Golongan IX)
135	SMA NEGERI 2 BAKUNG SERUMPUN	MAIMUN, S.Pd NIPPPK 199612252025212021	(Golongan IX)
136	SLB NEGERI LINGGA	MUTTAQIN NIPPPK 198501012025211053	(Golongan V)
137	SMA NEGERI 1 SERASAN TIMUR	NELLY PARIDA, S.Pi NIP 197807112008032001	Penata Muda Tk.I (III/b)
138	SMK NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	MUHAMMAD KHORUL ANUAR, S.Pd NIPPPK 199709152022211001	(Golongan IX)
139	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	VIKON WOWOR A.Md NIP 198105132000711008	Pengatur TK I (II/d)
140	SMA NEGERI 1 MIDAI	APRILLIA NOVIANTI NIPPPK 200204022025212019	(Golongan V)
141	SMA NEGERI 1 PULAU LAUT	TOMI, S.Pd NIPPPK 198811052022211014	(Golongan IX)
142	SMA NEGERI 1 PULAU TIGA	MEKO HENDWI PRATAMA, S.Pd NIPPPK 199708072023211002	(Golongan IX)
143	SMA NEGERI 1 SUBI	M. KENAINI NIPPPK 198707062025211158	(Golongan V)
144	SMA NEGERI 1 BATUBI	MAMEK ROMADON NIP 198605242014081001	Pengatur (II/c)
145	SMA NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	SUPRIYONO, S.Pd NIP 197807152010011011	Penata Tk.I (III/d)
146	SMA NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	MUHAMMAD AL MUHASSYIBY, S.Pd NIPPPK 199605152022211005	(Golongan IX)
147	SMA NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	SADIKUN NIPPPK 198911082025211017	(Golongan V)
148	SMA NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	LUKMAN HAKIM, S.Pd NIPPPK 199306222024211017	(Golongan IX)
149	SMA NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	HENDRO RUBITO, S.Pd NIPPPK 199306102022211015	(Golongan IX)
150	SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	SYARIFAH RADHIAH S. Pd NIP 197202292014082001	Penata Muda (III/a)
151	SMA NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	MURATIH NIPPPK 199704252025212016	(Golongan IX)
152	SMA NEGERI 1 SERASAN	NURDIN A.Md NIP 197704162008011012	Pengatur Tk.I (II/d)
153	SMA NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	SYURADMHAN, S.Pd NIP 199001282014031002	Penata Muda Tk.I (III/b)
154	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	IJAL PANDI, S.Pd NIPPPK 199408292023211007	(Golongan IX)

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
		NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN
155	SLB NEGERI NATUNA	DEDI NIRWANDI NIPPPK 198709082025211018	(Golongan V)
156	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	ZUBAINAH, A.Md NIPPPK 198409132025212064	(Golongan V)
157	SMA NEGERI 1 SELUAN	MAHMUD ISKANDAR, S.Pd NIPPPK 199502022025211037	(Golongan IX)
158	SMA NEGERI 1 SIANTAN	NURHASNI, S.S NIP 19841222010012017	Penata Tk.I (III/d)
159	SMA NEGERI 1 SIANTAN TIMUR	TUTI ANGRAINI, S.Pd NIP 199402052019032004	Penata Muda (III/a)
160	SMA NEGERI 1 PALMATAK	LENA SULASTRI NIP 198508312010012008	Pengatur Tk.I (II/c)
161	SMA NEGERI 1 SIANTAN UTARA	HERU ADRIANSYAH. S.Pd NIP 199408092020121002	Penata Muda (III/a)
162	SMA NEGERI 1 JEMAJA	SESWANDI NIP 198104092010011007	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
163	SMK NEGERI 1 ANAMBAS	ZULMANELI, S.Pd NIPPPK 199209062022212021	(Golongan IX)
164	SMK NEGERI 2 ANAMBAS	JHON HENRI SARAGIH, S.Pd NIPPPK 198604122022211026	(Golongan/IX)
165	SMK NEGERI 3 ANAMBAS	RABU JALIL, S.P NIPPPK 198911152024211016	(Golongan IX)
166	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	SYAFARUDIN NIPPPK 198302242025211016	(Golongan V)
167	SLB NEGERI ANAMBAS	FENI SUSILAWATI NIPPPK 200105302025212036	(Golongan V)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD